

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Konsep dan Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro, banyak yang berpendapat bahwa pertumbuhan yang cepat berakibat buruk kepada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Disamping itu, terdapat pendapat yang hebat terdengar dikalangan pembuat kebijakan bahwa pengeluaran publik yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan. Pendapat yang mengatakan bahwa konsentrasi penuh untuk mengurangi kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan sebanding dengan argumen yang menyatakan bahwa derajat ketimpangan yang rendah akan mengalami tingkat pertumbuhan yang lambat juga. Khususnya jika terdapat redistribusi pendapatan atau aset dari golongan kaya ke golongan miskin, bahkan jika melalui pajak progresif, terdapat kekhawatiran bahwa jumlah tabungan akan menurun¹.

¹ MP Todaro, Smith SC.. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kedelapan* (Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: Economic Development, 2004) Hlm. 249

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang². Dalam pandangan nya, Arsyad menyampaikan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak³.

Menurut Todaro dalam Arsyad (2016) ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu⁴ :

1) Akumulasi modal

Akumulasi modal mencakup semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa depan. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan,

² Rahardjo Adiasasmita, *Dasar – Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 205

³ Andri Nurmalita Suryandari, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014”, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm. 28

⁴ *Ibid*, hlm. 29

listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi.

2) Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3) Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni:

- a) Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
- b) Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*) atau hemat modal (*capital saving*), yaitu

tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.

- c) Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

b. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. surat Hud ayat 61:

﴿وَإِلَىٰ نَعْمَدِ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾

ia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya”. Artinya, bahwa Allah Swt. menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada

orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur.” Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia⁵.

Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi.

Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan dan kemajuan aspek materil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi mencakup aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dalam pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasar-dasar keadilan sosial,

⁵ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam*(Malaysia: Pelanduk Publication, 1991), 5–6.

kesamaan, Haka Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia.¹⁵ Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral⁶.

c. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan, yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada

⁶ Maro, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.1. No.2 November 2018

tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

- 2) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)⁷.

⁷ Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional : Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 13

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada periode tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah⁸.

Menurut Badan Pusat Statistik untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu⁹:

1) Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya tahun).

Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu¹⁰:

⁸ *Ibid*, hlm. 19

⁹ Badan Pusat Statistik Sumsel, 2019

- a) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- b) Pertambangan dan Penggalian.
- c) Industri Pengolahan.
- d) Listrik, Gas dan Air Bersih.
- e) Bangunan/Konstruksi.
- f) Perdagangan, Hotel dan Restoran.
- g) Pengangkutan dan Komunikasi.
- h) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
- i) Jasa-jasa.

2) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa, yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB juga mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurang subsidi).

3) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

¹⁰ Tarigan (2007, h. 13).

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b) Pengeluaran konsumsi pemerintah
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d) Perubahan inventori
- e) Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

2. Kemiskinan

a. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Secara harfiah kamus besar Bahasa Indonesia, miskin dapat di artikan tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standar, tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Miskin pun dapat di terjemahkan hanya dapat memenuhi makanan, pakaian dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minim¹¹.

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.

¹¹ Rismawati, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Gowa", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , 2018, Hlm.13

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, berwajah banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling berdayaguna, signifikan, dan relevan, pengkajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus menerus diupayakan. Pengupayaan tersebut tentu sangat berarti sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan manusia¹².

World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik¹³.

Menurut Paul Hoffman Setiap orang dapat memahami suatu negara yang terbelakang apabila melihatnya. Negara yang ditandai

¹² Ibid, Hlm.14

¹³ Andri Nurmalita Suryandari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014", *Skripsi*: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hlm. 17

oleh kemiskinan, apabila negara yang dipadati oleh pengemis, jarang memiliki industri, pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai, rumah sakit dan lembaga pendidikan tinggi sangat sedikit, sebagian besar penduduk buta huruf¹⁴.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan Kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar itu antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam lingkungan hidup, rasa aman, ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik¹⁵.

Lebih lanjut Direktorat Kependudukan menyatakan bahwa Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang dihadapi oleh setiap Negara, baik Negara maju maupun Negara sedang berkembang. Masalah kemiskinan juga terkait dengan masalah kekurangan pangan, gizi, rendahnya tingkat pendidikan, rawannya kriminalitas, tingginya tingkat pengangguran, dan

¹⁴ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 15

¹⁵ Bappenas.Co.Id, Diakses Pada Tanggal 21 September 2019

masalah-masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan penduduk¹⁶.

Dari pandangan di atas diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa kemiskinan merupakan keadaan atau kondisi terbatas yang dialami orang atau sekelompok orang bahkan jangkauan yang lebih luas sehingga tidak terpenuhinya berbagai kebutuhan mendasar tidak hanya pada perekonomian. Karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak terfokus pada dimensi pendekatan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan dimensi pendekatan lain, yaitu pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial.

b. Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan yang diukur dari sisi pengeluaran¹⁷. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

¹⁶ Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Bappenas, “Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera Kps Dan Keluarga Sejahtera-I/Kks-I)”, 2010

¹⁷ Badan Pusat Statistik, 2019, Bps.Go.Id

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM sendiri merupakan pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dll). Sedangkan GKNM atau garis kemiskinan non makan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan¹⁸.

Rumus perhitungan¹⁹

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Namun demikian, kemiskinan memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan seperti peluang

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Ibid,

memperoleh kesehatan dan umur yang panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan²⁰. Pada intinya, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihannya dalam hidup. BPS menyatakan bahwa jika rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata nasional sebesar Rp.1.990.170 per rumah tangga per bulan²¹. Garis kemiskinan sumatera selatan sendiri pada tahun 2018 adalah Rp.379.052, sedangkan secara nasional Indonesia memiliki angka garis kemiskinan sebesar Rp.392.154²².

Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia akan memperluas pilihan manusia terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah yang memiliki kualitas pembangunan manusia yang baik maka idealnya akan memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang rendah.

Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif²³.

²⁰ Anggit Yoga Permana, "Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009" Dalam *Jurnal Diponegoro Journal Of Economic*, Universitas Diponegoro, Semarang: 2012 Hlm. 29

²¹ Liputan6.Com, Diakses Pada 19 Oktober 2019, Pukul 22:10

²² Badan Pusat Statistik, 2018

²³ Irhamni, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1986-2015", *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hlm. 15

1) Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Seperti kebanyakan persoalan pembangunan ekonomi, di satu sisi permasalahan pemberantasan kemiskinan absolute merupakan berita buruk, namun di sisi lain adalah berita baik. Kemiskinan absolute ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki

pertambahann penduduk yang mayoritas nya berpendapatan rendah dan mempunyai banyak penduduk miskin²⁴.

Dapat disimpulkan secara umum bahwa kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang terburuk yang diukur dari tingkat kemampuan suatu keluarga dalam membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan taraf hidup kemanusiaan yang paling rendah.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal²⁵.

Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori

²⁴ Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Hlm. 260

²⁵ Elvira Handayani Jacobus, Dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara”, Dalam *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol.19, No.7 2018, Hlm. 5

miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan²⁶. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin, dengan demikian ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”²⁷.

Kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau mampu untuk di kurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok

²⁶ Irhamni, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1986-2015”, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hlm. 15

²⁷ Bappenas, *Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/Kps Dan Keluarga Sejahtera-I/Ks-I*, Jakarta, 2010, Hlm. 8

masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan serta membebaskan diri sendiri dari perangkap kemiskinan atau bisa dikatakan “seseorang atau sekelompok masyarakat miskin karena mereka miskin”²⁸.

c. Karakteristik–karakteristik Kemiskinan

- 1) Mereka yang hidup di bawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti: tanah yang cukup, modal dan keterampilan yang tidak mencukupi. Sebagai akibat faktor produksi yang dimiliki sangat terbatas, maka kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- 2) Mereka pada umumnya tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha.
- 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah. Pendidikan ini sangat rendah karena waktu mereka lebih banyak tersita untuk mencari nafkah. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolahnya karena harus membantu orang tuanya mencari tambahan pendapatan.
- 4) Banyak diantara mereka tidak mempunyai tanah. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar

²⁸ Bappenas, *Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/Kps Dan Keluarga Sejahtera–I/Ks-I*, Jakarta, 2010, Hlm. 8

pertanian. Karena itu pekerjaan pertanian bersifat musiman, maka kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas yang berusaha apa saja. Akibatnya, dalam situasi penawaran kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga membuat mereka selalu hidup di bawah kemiskinan²⁹.

d. Penyebab Kemiskinan

Menurut Ravi Kanbur dan Lyn Squire kemiskinan terjadi karena dampak dari kebijakan pemerintah. Pemerintah yang pro-kemiskinan akan melakukan perbaikan di bidang kesehatan sehingga kesehatan akan meningkat, dan anak-anak sekolah akan bisa bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai skill yang selanjutnya membuat produktivitasnya meningkat dan pendapatannya meningkat. Produktivitas yang meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat dan angka kemiskinan akan berkurang. Namun apabila pemerintah tidak prokemiskinan, maka kesejahteraan rakyat miskin tidak akan dipedulikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh pejabat tinggi dan orang-orang yang mempunyai uang³⁰. Selanjutnya, Menurut Samuelson dan Nordhaus, penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara

²⁹ Muhammad Arifin, *Penanganan Kemiskinan Dalam Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan* (Medan: 2008), Hlm. 42

³⁰ Purwiyanti Septina Franciari, "Analisis Hubungan Ipm, Kapasitas Fiskal, Dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2008 Dan 2010)". Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012)

yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan³¹.

Bappenas menguraikan indikator-indikator penyebab kemiskinan seperti³²:

- 1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
- 2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.
- 3) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung.

³¹ Paul A Samuelson Dan William D Nordhaus. *Pengantar Teori Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 1997).

³² Andri Nurmalita Suryandari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014", *Skripsi*: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hlm.20

- 4) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.
- 5) Terbatasnya akses layanan kesehatan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak.
- 6) Terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air.
- 7) Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.
- 8) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.

- 9) Lemahnya jaminan rasa aman. Hal ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah konflik.
- 10) Lemahnya partisipasi. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang melibatkan mereka.
- 11) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan menurut Hartomo dan Azis³³ :

- 1) Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

- 2) Rendahnya Derajat Kesehatan

³³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan. Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm.115

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

3) Terbatasnya Lapangan Kerja

Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

4) Kondisi Keterisolasian

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Apabilahal-hal tersebut dapat dilakukan dengan segera, maka penduduk dapat menggunakan modal dengan lebih efektif, menyerap teknologi baru dan belajar dari kesalahannya.

Apabila ini ditunjang dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai, maka akan segera dapat mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan (termasuk keterampilan), tingkat kesehatan yang rendah dan terbatasnya fasilitas umum merupakan penyebab dari adanya kemiskinan.

3. Kesehatan

IPM kini sudah dipakai sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu prioritas pembangunan selalu diarahkan pada upaya peningkatan IPM di wilayahnya. Wajar bila banyak Pemerintah Daerah yang memprioritaskan 3 pilar pembangunan yaitu: ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis³⁴.

Mils dan Gilson dalam Andri menjelaskan bahwa Ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut³⁵:

- 1) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.

³⁴ Kementerian Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, www.depkes.go.id

³⁵ Andri Nurmalita Suryandari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014", *Skripsi*: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hlm.38

- 2) Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- 3) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.
- 4) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
- 5) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Disamping itu kesehatan tidak dapat dinapihkan bahwa perannya sangat vital dalam menjaga kestabilan perekonomian maksudnya adalah ketika kesehatan dapat terjaga sudah barang tentu aktivitas disektor ekonomi akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas³⁶.

Dengan merujuk konsep sehat yang dewasa ini dipaham. berdasarkan rumusan WHO yaitu: *Health is a state of complete physical, mental and social-being, not merely the absence of disease or infirmity*. Berbagai upaya yang mesti dilakukan agar orang tetap sehat

³⁶ Rismawati, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Gowa", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , 2018, Hlm.36

menurut para pakar kesehatan, antara lain, dengan mengonsumsi gizi yang cukup, olahraga cukup, jiwa tenang, serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat menjadikannya terjangkit penyakit. Hal-hal tersebut semuanya ada dalam ajaran Islam, bersumber dari hadits-hadits shahih maupun ayat Al-Qur'an. Dalam ilmu kesehatan atau gizi disebutkan, makanan adalah unsur salah satu terpenting untuk menjaga kesehatan. Kalangan ahli kedokteran Islam menyebutkan, makan yang halal dan thayyiban. Al-Quran berpesan agar manusia memperhatikan yang dimakannya, seperti ditegaskan dalam ayat:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ³⁷

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”.(QS. ‘Abasa 80 : 24)³⁷.

Variabel-variabel yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan di suatu daerah umumnya terdiri dari³⁸:

1) Tingkat Kesakitan Penduduk

Tingkat keluhan penduduk terhadap kesehatannya, dimana semakin banyak jumlah keluhan ini maka semakin buruk kesehatan di daerah tersebut.

2) Sarana Kesehatan

³⁷ <https://library.unusa.ac.id/2015/02/26/pentingnya-menjaga-kesehatan-menurut-islam/>, diakses pada 08 juni 2020 pukul 19:00

³⁸ Andri Nurmalita Suryandari, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014”, *Skripsi*: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, Hlm39

Sarana kesehatan merupakan gambaran jumlah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta beserta kapasitas tempat tidurnya. Selain itu juga menjelaskan jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan posyandu.

3) Angka Harapan Hidup

Untuk bidang kesehatan, indikator yang mewakili dalam IPM adalah Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup saat lahir penduduk yang hidup berumur panjang umumnya memiliki tingkat kesehatan yang baik. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya³⁹. Angka Harapan Hidup menggambarkan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi AHH semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut.

4) Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang pada

³⁹ Anggit Yoga Permana, "Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009" Dalam *Jurnal Diponegoro Journal Of Economic*, Universitas Diponegoro, Semarang: 2012 Hlm.3

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan⁴⁰. Tenaga kesehatan menggambarkan jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan dan perawat. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

4. Tingkat Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

⁴⁰ Kementerian Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, [Www.Depkes.Go.Id](http://www.depkes.go.id)

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara⁴¹.

Menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 pendidikan adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik didalam maupun diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila⁴².

Menurut Green bahwa tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberikan respon terhadap sesuatu yang datang dari luar, mereka yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan memberi respon yang rasional daripada mereka yang berpendidikan rendah. Orang yang mempunyai pendidikan tinggi diharapkan lebih peka terhadap kondisi keselamatannya, sehingga lebih baik dalam memanfaatkan fasilitas keselamatan⁴³.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

⁴¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, <https://Kelembagaan.Ristekdikti.Go.Id>, Diakses Pada 13 September 2019

⁴² Elvira Handayani Jacobus, Dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara", Dalam *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol.19, No.7 2018, Hlm. 7

⁴³ Ibid,

bertanggung jawab. Jalur pendidikan yang ada di Indonesia meliputi⁴⁴:

- 1) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Jenjang pendidikan formal.
 - a) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat⁴⁵.
 - b) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat⁴⁶.

⁴⁴ Rismawati, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Gowa", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, Hlm. 30

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, <https://Kelembagaan.Ristekdikti.Go.Id>, Diakses Pada 13 September 2019

⁴⁶ *Ibid*,

- c) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas⁴⁷.
- 2) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.
- 3) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

⁴⁷ Ibid,

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia (*human capital*) adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan⁴⁸. Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah⁴⁹.

1) Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-

⁴⁸ Michael P. Todaro Dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan*. (Jakarta: Erlangga, 2004).

⁴⁹ Andri Nurmalita Suryandari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014", *Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta*, 2017, Hlm. 35

12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Adakalanya penduduk usia 7-12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar.

2) Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yakni merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

3) Angka Melek Huruf

Salah satu variabel yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

4) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat disuatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendidikan

Faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan menurut Hasbullah adalah sebagai berikut: Ideologi, sosial ekonomi, sosial budaya, perkembangan IPTEK dan Psikologi⁵⁰.

- 1) Ideologi, Semua manusia dilahirkan kedunia mempunyai hak yang sama khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan pendidikan.
- 2) Sosial Ekonomi, Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- 3) Sosial Budaya, Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya.

⁵⁰ Elvira Handayani Jacobus, Dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara", Dalam *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol.19, No.7 2018, Hlm. 7

- 4) Perkembangan IPTEK, Perkembangan IPTEK menuntut untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan negara maju
- 5) Psikologi, Konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai.

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan. Menurut Kuznets dalam Todaro pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Todaro menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan

upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi⁵¹.

B. Penelitian Terdahulu

No.	NamaPeneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yusrodika Wirianto, 2015	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Barat	kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan, sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat.	Menggunakan metode penelitian menggunakan data sekunder	Menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independent
2.	Teguh Anshori, 2013	Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tenaga Kerja Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2006-2010	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB.	Menggunakan variabel kemiskinan sebagai variabel independent dan menggunakan data panel	Menggunakan variabel tenaga kerja sebagai variabel independent
3.	Andri Nurmalita Suryandari, 2017 ⁵²	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap	Pendidikan diukur dengan Rata-rata lama sekolah tidak	Menggunakan variabel kesehatan dan tingkat pendidikan sebagai variabel	Tidak menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai

⁵¹ Rismawati, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Angka Kemiskinan Di Kabupaten Gowa", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , 2018, Hlm.14

⁵² Andri Nurmalita Suryandari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014", *Skripsi*: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

		Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2014	berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan	independent	varabel dependent
4.	Ahmad Soleh, Yunie Rahayu, Staff Pengajar Stie Muhammadiyah Jambi, 2018 ⁵³	Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Propinsi Jambi	Selama periode 2005-2015 angka kemiskinan penduduk Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 0,39%	Menggunakan pendidikan dan kesehatan sebagai variabel independent	Tidak menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependent
5.	Saharuddin Didu, Ferri Fauzi ⁵⁴	Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak	Jumlah penduduk dan pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan	Menggunakan pendidikan sebagai variabel independent	Menggunakan variabel Pertumbuhan Penduduk sebagai variabel independent
6.	Susi Handayani ⁵⁵	Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 2011-2015	Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan	Menggunakan analisis regresi data panel	Menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independent

Sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kesimpulan sementara yang belum final atau dugaan sementara yang merupakan konstruk peneliti terhadap

⁵³ Anggit Yoga Permana, "Analisis Pengaruh Pdrb, Pengangguran, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009" Dalam *Jurnal Diponegoro Journal Of Economic*, Universitas Diponegoro, Semarang: 2012

⁵⁴ Saharuddin Didu, Ferri Fauzi, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dna Pertumbuhsn Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak, *Dalam Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol.6, No.1, April 2016

⁵⁵Susi Handayani, "Analisis Pengaruh Pertumbuhsn Ekonomi, Jumlah Penduduk Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah 2011-2015, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel, yang dugaan tersebut perlu dibuktikan dengan penelitian ilmiah⁵⁶.

Melihat alasan diatas terlihat bahwa sangat penting sebagai langkah awal sebelum kesimpulan diambil, berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

H1.1 : Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi

H1.2 : Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi

H1.3 : Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan
Ekonomi

H2 : Kemiskinan , Kesehatan dan Tingkat Pendidikan berpengaruh
secara

simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

D. Kerangka Konsep

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun suatu kerangka teori dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar berikut :

⁵⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 131



